



BALAI RW BISA DIJADIKAN RUANG ISOLASI **Pemkot Aktifkan Posko PPKM untuk Awasi Pemudik**

UMBULHARJO (MERAPI)- Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pendataan pemudik serta pendatang di Kota Yogyakarta akan diaktifkan kembali mulai bulan Ramadan ini. Hal itu untuk mengantisipasi warga luar DIY yang kembali ke Yogyakarta sebelum larangan mudik berlaku pada 6-17 Mei 2021. Terutama untuk mencegah potensi sebarang Covid-19 dari para pemudik.

“Selama Ramadan ini kami minta lurah,

***Bersambung ke halaman 9**

camat dan beberapa OPD untuk mengaktifkan posko PPKM. Seperti Ramadan dan Lebaran tahun lalu melakukan pengawasan dan pemantauan orang yang datang dari luar Yogyakarta,” kata Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Rabu (21/4).

Pihaknya berharap warga Yogyakarta agar mengimbau keluarganya yang berada di luar DIY untuk tidak mudik Lebaran maupun saat Ramadan tahun ini. Apabila ditemukan warga yang sudah mudik maupun akan mudik, Posko PPKM diminta memantau dan memastikan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 dilaksanakan.

”Tanyakan kelengkapan surat-suratnya (kesehatan). Kalau kondisinya sehat diminta isolasi selama lima hari. Kalau tidak sehat dan terindikasi Covid-19, maka harus isolasi dua minggu. Apabila bergejala harus dibawa ke rumah sakit. Ini dilakukan serentak di posko-posko yang ada,” terang Wakil Walikota Yogyakarta itu.

Dia menyatakan apabila kondisi rumah tidak memungkinkan, maka di Balai RT atau Balai RW maupun kampung. Jika tidak bisa, isolasi dapat dilakukan di hotel.

Sedangkan kalau didapati kasus positif Covid-19 tanpa gejala isolasi di rumah maupun mencari hotel yang menyediakan ruang isolasi.

”Kami mengimbau agar tidak mudik. Kalau ada yang lolos dan bisa mudik, ketika pulang wajib isolasi,” ujarnya.

Selain itu dia mengimbau agar warga mengaktifkan kembali pendataan warga pendatang maupun yang pulang dari luar DIY. Selama ini Pemkot Yogyakarta menerapkan pendataan pendatang dan pemudik secara online melalui corona.jogjakota.go.id. ”Pendataan masih. Itu saya minta diaktifkan kembali untukantisipasi orang-orang yang akan datang melalui laporan itu,” imbuh Heroe.

Dia menyampaikan, tidak akan melakukan penyekatan untukantisipasi pemudik karena posisi Kota Yogyakarta berada di tengah kabupaten di DIY. Tidak berbatasan langsung dengan wilayah di luar DIY. Namun demikian akan ada pemeriksaan acak kelengkapan surat-surat kesehatan di tempat-tempat umum dan tempat wisata.

”Yang paling banyak akan kami lakukan adalah sweeping acak di destinasi wisata dan tempat-tempat layanan umum. Kalau di rumah pasti diperiksa

petugas posko PPKM dan di hotel kami sudah ada kerja sama dengan Satgas Covid-19 di hotel untukantisipasi orang datang tanpa dilengkapi surat sehat,” tandasnya.

Sementara itu Pemda DIY melaporkan penambahan 229 kasus positif Covid-19, Rabu (21/4) sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 37.589 kasus.

”Penambahan kasus sembuh sebanyak 242 kasus sehingga total sembuh menjadi 32.152 kasus dan 9 kasus meninggal sehingga total kasus meninggal menjadi 919 kasus,” jelas Juru bicara Pemda DIY untuk penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih.

Distribusi kasus terkonfirmasi Covid-19 terdiri dari 30 warga Kota Yogyakarta, 72 warga Bantul, 35 warga Kulonprogo, 1 warga Gunungkidul, dan 91 warga Sleman.

”Rincian riwayat kasus terdiri dari 36 kasus periksa mandiri, 177 kasus hasil tracing kasus sebelumnya, 2 kasus perjalanan luar daerah, dan 14 kasus belum ada info,” jelasnya. Distribusi kasus sembuh terdiri dari 25 warga Kota Yogyakarta, 82 warga Bantul, 97 warga Kulonprogo, 16 warga Gunungkidul, dan 22 warga Sleman. **(Tri/C-4)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			
3. BPBD			
4. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005